

PENDUDUK, OTONOMI KHUSUS, DAN FENOMENA KONFLIK DI TANAH PAPUA

La Pona*

Abstract

The dynamic of population in Papua region dominant influenced by migration process, and create plural societies in urban and rural area. The dynamic of population produce the specific of social structure, social stratification, and social networking in this society which are multi race, multi ethnic, multi cultural, multi religion, and multi region. This condition must be careful, because of having positif and negatif impact in development process. That condition could make the social strained condition, weakness capacity of social receive, and conflict situation which must be understood. The social-political conditions influenced the conflict construction in this plural society. To Create the awareness, common will, political will, social networking, and cross cutting affiliation in this plural society are very important to avoid or minimize the social strained, controversy, dispute, contradiction, opposition, resistance, or conflict in this plural society.

Keyword: Population, Plural, Politic, Conflict

Dinamika penduduk di Papua dominan dipengaruhi migrasi dibanding penambahan alami serta membentuk masyarakat majemuk di perkotaan. Perubahan penduduk membentuk struktur sosial, klasifikasi sosial, dan jaringan sosial masyarakat spesifik dalam masyarakat multi-ras, multi-etnik, multi-kultural, multi-agama, multi-kedaearahan, dan multi-afiliasi politik. Karakteristik masyarakat ini mempunyai dampak negatif dan positif terhadap proses pembangunan. Situasi masyarakat ini cenderung melahirkan ketegangan sosial, melemahnya daya tampung sosial dan konflik sosial yang perlu dimengerti. Kondisi sosial politik turut mempengaruhi konstruksi konflik dalam masyarakat majemuk ini. Mengembangkan kesadaran bersama, kemauan bersama, interaksi sosial dan jaringan sosial saling silang-menyilang dalam masyarakat majemuk penting dilakukan dalam upaya menekan atau meminimalisasi ketegangan sosial, kontradiksi, perselisihan, kontradiksi, oposisi, perlawanan, dan suasana konflik.

Kata kunci: Penduduk, Majemuk, Politik, Konflik

* La Pona adalah dosen Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua. *E-mail:*lapona@yahoo.com.

PENGANTAR

Penyelesaian konflik sosial yang menggunakan pendekatan politik dan keamanan (militerisme) walaupun kelihatannya berhasil tetapi tidak kunjung melemah bahkan melahirkan beberapa pelanggaran hukum dan HAM. Pendekatan represif belum mampu mewujudkan suatu masyarakat yang tenteram, aman, dan nyaman, malah melahirkan perlawanan sosial beberapa kelompok masyarakat sipil melalui beberapa strategi, metode atau cara baru. Model perlawanan masyarakat sipil terus mengalami penyesuaian sehingga diperlukan pengembangan pendekatan penyelesaian yang lebih maju sehingga bisa mencegah dan menghindarkan masyarakat dari konflik sosial. Pemerintah daerah belum menyadari betul pentingnya pendekatan sosial dalam penyelesaian konflik sosial, tetapi bukan berarti pendekatan keamanan tidak diperlukan.

Tulisan bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, wawasan, dan pandangan pada semua pihak bahwa persoalan konflik sosial di Papua sudah saatnya diselesaikan melalui pengembangan pendekatan sosial. Pendekatan sosial dapat menyelesaikan dan meminimalisasi persoalan sosial daerah ini. Para perencana pembangunan nasional dan daerah perlu memikirkan dan merancang model-model baru penyelesaian konflik yang tidak terlalu mengedepankan kekuatan fisik (militeristik), melainkan melalui suatu pengembangan dan pembentukan konstruksi sosial masyarakat baru, yaitu rekonstruksi elemen-elemen sosial dalam asosiasi-asosiasi masyarakat yang memperhatikan, mempertimbangkan, dan menggunakan karakteristik sosial spesifik masyarakat. Pengembangan konstruksi sosial baru masyarakat melalui asosiasi-asosiasi masyarakat bisa efektif mereduksi persoalan, perselisihan, ketegangan dan pertentangan antarmasyarakat.

Pemerintah Provinsi Papua membutuhkan perencanaan sosial dalam mendukung masa depan pembangunan daerah dan nasional di tanah Papua. Tulisan ini didasarkan pada kajian literatur (teori), makalah dan surat kabar, observasi terhadap situasi konflik sosial yang selama ini berlangsung, dan wawancara terhadap beberapa anggota masyarakat. Beberapa ulasan diambil dari buku-buku yang ditulis penulis sendiri.

PENDUDUK PAPUA

Penduduk Papua tahun 1961 (± 758.000 jiwa), 1971 (± 923.000 jiwa), 1980 ($\pm 1.174.000$ jiwa), 1985 ($\pm 1.371.000$ jiwa), 1990 ($\pm 1.629.000$ jiwa), dan 2000 ($\pm 2.563.000$ jiwa) (BPS, 2008), mendiami wilayah ± 3 kali Pulau Jawa sehingga penduduknya sedikit dibanding Kabupaten/Kota Bogor (3.508.826 jiwa), Bandung (4.158.083 jiwa), atau Malang (2.412.570 jiwa) (BPS, 2000). Sensus Penduduk (SP, 1971, 1980, 1990, 2000) menunjukkan pertumbuhan penduduk dominan karena migrasi (*immigration*) dari provinsi lainnya dibanding penambahan alami (*natural increase*), serta telah merubah komposisi penduduk, struktur penduduk, dan memunculkan konflik

sosial. Papua sejak lama memang menjadi daerah tujuan migran dan transmigrasi di Indonesia walaupun situasi sosial, politik, ideologi, dan keamanan tidak selalu stabil. Bagi negara, program transmigrasi memiliki tujuan-tujuan penting. Bagi migran spontan pertimbangan ekonomi menjadi faktor utama ke daerah ini. Migran spontan dominan berasal dari Pulau Jawa, Sulawesi, dan Maluku, sedangkan transmigran terbanyak berasal dari Pulau Jawa.

Pertumbuhan penduduk karena migran dianggap telah membuat orang asli sulit memperbaiki kehidupan, memiskinkan, memarjinalkan, memunculkan situasi konflik, dan pandangan negatif lainnya, sedangkan transmigrasi dihentikan karena dinilai sekelompok masyarakat asli sebagai penyebab penderitaan orang asli, pengambilan lahan-lahan subur orang asli, penghilangan sumber kehidupan orang asli (berburu dan perambahan), rusaknya nilai sosial budaya orang asli, program Islamisasi, Jawanisasi, kolonisasi, aneksasi, dan lainnya. Pandangan-pandangan tendensius ini tentunya dengan berbagai alasan, motif, dan tujuan tertentu pula, serta telah memunculkan perasaan kurang senang, kurang bersahabat, sikap penolakan dan suasana konflik tertutup antara sekelompok orang asli dengan migran dan transmigran. Padahal sejak masuk kepangkuan Ibu Pertiwi sesungguhnya migran dan transmigran telah sangat banyak memberikan kontribusi positif, penting, dan strategis bagi kehidupan masyarakat asli serta pembangunan daerah dan nasional di tanah Papua.

OTONOMI KHUSUS DAN RAPERDASI

UU Otonomi Khusus, melalui rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang pembangunan kependudukan mengatur aspek migrasi, transmigrasi, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, administrasi kependudukan, dan lainnya. Raperdasi ini belum ditetapkan karena ada pasal-pasal digunakan secara sistematis membatasi migran masuk ke daerah ini, sehingga *draft* Perdasi ini belum juga disetujui lembaga legislatif, karena dinilai bersifat radikal dan berpotensi konflik, sebagaimana pernyataan ketua DPRP bahwa rancangan Perdasi tentang pembangunan kependudukan akan direvisi karena isinya dinilai terlalu radikal dan berpotensi konflik.

“...isi Raperdasi pembangunan kependudukan ini ada hal-hal yang radikal. Aturan model begini tentu sangat tidak adil, ini berdasarkan aturan dari mana. Tidak bisa begitu, kita boleh bicara tetapi kita juga harus berpikir bahwa Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan asas negara kita adalah Pancasila, itu yang harus diingat...” (Drs. Jhon Ibo, MM, 7 Agustus, 2008).

Lembaga politik daerah ini khawatir terciptanya suasana konflik antara migran dan penduduk asli. Pasal ini dinilai banyak pihak merupakan upaya menetapkan Papua sebagai daerah tertutup (*close area*). Kalangan lain mencurigainya sebagai upaya sistematis dan tersembunyi dari gerakan Papua merdeka karena kalau migran semakin

banyak maka upaya merdeka semakin sulit. Beberapa kalangan menilai daerah ini masih sangat banyak membutuhkan penduduk untuk mendukung pembangunan daerah dan nasional sehingga tidak perlu dibatasi, dan tidak tepat kalau menuduh migran sebagai penyebab utama buruknya kondisi orang asli karena penyebabnya sangat banyak. Pembatasan migran juga dinilai berkonsekuensi pelanggaran HAM (mis. hak sipil, sosial, budaya, ekonomi, dan politik) dan hak-hak warga negara. Argumentasi tentang perlu tidaknya pembatasan migrasi sebagai upaya mempercepat perbaikan hidup masyarakat asli, ditemukan beragam, misalnya Salossa (2006), seorang mantan Gubernur Provinsi Papua dalam disertasinya mengemukakan perlunya membatasi migran ke daerah ini untuk memproteksi orang asli, perbaikan kehidupan orang asli dan pembangunan Papua ke depan. Ini berarti ideologi politik membatasi migran masuk selama ± 25 tahun pelaksanaan otonomi khusus (otsus) cenderung memicu kontradiksi dalam masyarakat karena migran walaupun berpengaruh negatif terhadap kehidupan masyarakat asli, tetapi telah banyak memberikan kontribusi positif terhadap orang asli, pembangunan daerah dan nasional.

KOMPOSISI PENDUDUK

Proses migrasi mengakibatkan perubahan komposisi penduduk migran dan orang asli. Populasi migran dan orang asli mulai berimbang dan apabila arus migrasi masuk terus berlangsung maka jumlah migran akan lebih dominan. Di perkotaan, migran sudah lebih banyak dibanding orang asli. Migran memiliki sumber daya manusia dan sosial-ekonomi lebih baik, sedangkan masyarakat kampung sebagian besar orang asli yang hidup dalam kemiskinan absolut dan struktural. Kehidupan sosial-ekonomi masyarakat kampung transmigran sedikit lebih baik. Perubahan komposisi penduduk ini ditanggapi beragam dalam kehidupan masyarakat asli seperti mendukung dan menolaknya melalui berbagai argumen. Terpusatnya pembangunan di perkotaan menyebabkan mengalirnya arus migran orang asli dari kampung pedalaman Papua ke kota-kota daerah pantai serta merubah komposisi penduduk orang pedalaman di daerah pantai. Orang asli Papua memang paling banyak berada di daerah pedalaman. Migran asal pedalaman ini cenderung mewarnai beberapa demonstrasi politik jalanan serta membuat kekhawatiran, ketakutan, dan kekurangnyamanan hidup masyarakat karena berpotensi rusuh.

Migrasi membentuk masyarakat Papua yang multiras, multisuku-bangsa, multi-etnik, multikedudukan, multikeagamaan, multiafiliasi, dan loyalitas politik. Perubahan komposisi penduduk membuat orang asli menjadi kurang nyaman karena belum terlalu terbiasa berada di lingkungan sosial di mana begitu banyak suku-bangsa di sekitar kehidupannya. Bagi masyarakat kota mungkin biasa, tetapi orang kampung belum terbiasa. Kalau dahulu hanya beberapa masjid, kini di mana-mana ada masjid dan orang berjilbab sangat banyak. Penganut agama Budha (Vihara) dan agama Hindu

(Phura) terus berkembang pula. Petani bukan saja orang asli, tetapi suku-bangsa lainpun ada bahkan lebih mampu berladang di wilayah adatnya. Dalam masyarakat asli terdapat ± 250 suku-bangsa, bahasa (lokal), adat istiadat, dan wilayah adat. Orang asli terbagi-bagi pula dalam ribuan marga (*clan*), serta stratifikasi sosial dan status sosial sehingga sesungguhnya di antara orang asli sendiri terpisah-pisah dan tidak saling mengenal.

STRUKTUR PENDUDUK

Pertumbuhan penduduk membentuk struktur penduduk spesifik serta menjadi perhatian, keprihatinan, kekhawatiran, dan ketidaksenangan kalangan tertentu masyarakat asli, serta menjadi salah satu isu sosial-politik. Struktur penduduk berkaitan dengan struktur sosial, lapisan sosial, interaksi sosial, dan jaringan sosial masyarakat, serta perlu dipahami dan dicermati karena pada taraf tertentu menimbulkan ketegangan sosial dan daya tampung sosial melemah. Migran telah menguasai sumber-sumber ekonomi masyarakat asli serta telah menimbulkan kesulitan hidup, rasa tidak suka, ketidaksenangan, dan kecemburuan sosial masyarakat asli terhadap migran. Sikap sosial ini mulai pula ditujukan pada orang asli yang tinggal dan sukses di daerah orang asli lainnya, walaupun tidak sampai pada pengusiran secara fisik terhadap migran karena mungkin tidak berani, takut terhadap pihak keamanan, atau karena kearifan budaya masyarakat. Menariknya wacana penolakan migran karena alasan ekonomi tertuju pada migran Buton, Bugis, Makassar (BBM), dan Jawa, tidak pada WNI keturunan China yang menguasai ekonomi di Papua.

Struktur sosial masyarakatnya secara horizontal ditandai kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku-bangsa, adat istiadat, agama, dan kedaerahan, serta secara vertikal ditandai perbedaan vertikal antarlapisan atas dan lapisan bawah. Perbedaan latar belakang menyebabkan masyarakat merupakan elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa dan atau kurang ada pembauran satu sama lain, dan otsus mempertegas pemisahan penduduk atas dasar ras. Struktur sosial vertikal bermasalah karena bersinggungan dengan struktur sosial horizontal. Keberhasilan pembangunan diukur dari membangun struktur sosial masyarakat ideal, seperti meminimalisasi kesenjangan masyarakat mampu dan tidak mampu, perbaikan kesejahteraan orang asli, penguatan sumber daya manusia orang asli, keberpihakan pada orang asli, dan meningkatkan keeratan dalam keberagaman masyarakat.

Pertanda paling jelas dari masyarakat yang bersifat majemuk ini adalah kurang adanya kehendak bersama (*common will*) karena aspek beragam. Masyarakat Papua sebagai keseluruhan terdiri atas elemen-elemen yang terpisah satu sama lain oleh karena perbedaan latar belakang, masing-masing lebih merupakan kumpulan individu-individu daripada sebagai suatu keseluruhan yang bersifat organis, dan sebagai individu kehidupan sosial masyarakat tidaklah utuh sehingga diperlukan keinginan untuk hidup bersama, kemauan hidup harmonis bersama migran atau kemampuan migran hidup

bersama masyarakat asli. Dibutuhkan keinginan bersama dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dalam keberagaman alami masyarakat ini. Semboyan pembangunan 'Papua zona damai' merupakan salah satu bentuk perjuangan itu.

Pembentukan asosiasi sosial keagamaan merupakan upaya mekanik membangun harmonisasi masyarakat, sekaligus indikasi kerawanan kehidupan umat beragama. Demonstrasi jalanan damai beberapa asosiasi keagamaan Kristen (2008) menentang dikembangkannya Bank Syariah, Bank Muamalat, *Papua Islamic Center*, pesantren, atau belum bisa dibangun masjid di Universitas Cenderawasih atau Masjid Agung di kota Manokwari, setidaknya mengindikasikan di tengah kedamaian itu masih ada persoalan antarumat beragama. Munculnya wacana kedatangan laskar Jihad bisa memperkuat fenomena konflik sosial yang perlu diperhatikan semua pihak. Kerukunan hidup beragama dapat dibentuk secara organik maupun mekanik pada tingkat individu, kelompok, golongan, organisasi, dan institusi. Membangun kebersamaan dan perdamaian dalam keberagaman masyarakat perlu terus dikembangkan.

Unsur sosial seperti norma sosial, lembaga sosial, kelompok sosial, institusi sosial, dan lapisan sosial dapat direkonstruksi guna mempererat hubungan sosial masyarakat majemuk ini, sebagaimana Soekanto (1983), mengemukakan kelompok sosial merupakan kesatuan manusia yang hidup bersama. Dia juga merupakan perwujudan dari pergaulan hidup atau kehidupan bersama atau pergaulan hidup itu mendapat perwujudannya di dalam kelompok-kelompok sosial. Institusi sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat adalah kumpulan dari norma sosial yang telah diciptakan untuk dapat melaksanakan fungsi masyarakat. Institusi tersebut meliputi kumpulan norma dan bukan norma yang berdiri sendiri. Roucok (1964), mengemukakan bahwa institusi sosial adalah pola yang telah mempunyai kedudukan tetap atau pasti untuk mempertemukan bermacam-macam kebutuhan manusia yang muncul dari kebiasaan dengan mendapatkan persetujuan dari cara-cara yang sudah tidak dipungkiri lagi, untuk memenuhi konsep kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan suatu struktur sosial, sebagaimana pula yang berkembang di wilayah ini.

Penguatan norma sosial akan mereduksi konflik sosial karena norma sosial merupakan sesuatu yang berada di luar individu, membatasi, dan mengendalikan tingkah laku mereka. Unsur pokok dari suatu norma adalah tekanan sosial untuk menjalankan norma tersebut (Berry, 1982; Syani, 1995; Michel, 1972). Tetapi, tidak ada suatu masyarakatpun yang benar-benar secara sukses dapat mempraktikkan atau mengelaborasi norma-norma sosial di dalam perilaku mereka. Semakin tinggi tingkat kesuksesan anggota atau kelompok masyarakat menaati norma-norma sosial yang ada, semakin tinggi pula tingkat kenyamanan dan ketenteraman hidup masyarakat dan demikian sebaliknya. Penanganan konflik bisa melalui penggalan, penguatan dan pemanfaatan norma sosial masyarakat, sekaligus meminimalisasi persoalan pelapisan sosial yang merupakan pembedaan (*diferensiasi*) yang berhubungan dengan perbedaan tingkatan di mana anggota-anggota masyarakat berada di dalamnya.

Struktur sosial masyarakat dapat direkonstruksi mengembangkan jaringan sosial, interaksi sosial, dan integrasi sosial masyarakat majemuk ini. Idealnya adalah terciptanya suatu rekonstruksi struktur sosial yang dapat mendukung berkembangnya jaringan sosial masyarakat sehingga anggota-anggota kelompok masyarakat memiliki interaksi sosial dan integrasi sosial yang semakin erat dan luas di dalam dan di luar kelompoknya sehingga tercipta suatu proses kebersamaan, penyatuan dan kesatuan dalam kemajemukan masyarakat. Minimalisasi konflik sosial dapat dilakukan melalui rekonstruksi sosial mendukung proses penguatan penyatuan masyarakat secara organik dan mekanik guna meningkatkan intensitas (*density*) hubungan sosial dalam keberagaman, yang diwujudkan dengan peningkatan intensitas kontak, komunikasi, jaringan sosial dan interaksi sosial masyarakat.

Rogers and Shoemaker (1983) dan Epstein (1961), mengemukakan jaringan sosial adalah suatu pasangan hubungan khusus di antara kelompok orang tertentu, sedangkan sifat dari hubungan tersebut secara keseluruhan dipakai untuk menafsirkan perilaku sosial dari orang-orang yang terlibat di dalam hubungan. Masyarakat selain dipandang sebagai kumpulan orang juga merupakan sekumpulan hubungan antar-anggotanya. Hubungan ini dapat berupa hubungan kekeluargaan, ketetanggaan, famili, marga, keturunan, persahabatan, pekerjaan, keagamaan, sosial, budaya, politik, ideologi, dan hubungan lain. Keeratan dan keluasan jaringan sosial lintas etnik dalam masyarakat Papua bisa meminimalisasi konflik. Lemahnya jaringan sosial lintas etnik selama ini bisa menjadi penyebab langgeng dan meningkatnya situasi konflik sosial.

Feagin dan Feagin (1984), menemukan bahwa dalam pergaulan antarindividu pada hampir semua masyarakat, baik yang amat sederhana maupun yang amat kompleks sifatnya selalu terdapat perbedaan derajat atau status. Setiap golongan membentuk gaya hidup dan adat kebiasaan yang khas serta sikap yang berbeda pula pada saat berinteraksi sosial dengan individu dari golongan atau status yang lain, sehingga pergaulan antar individu baik dalam golongan yang sama maupun antarindividu di luar golongan atau statusnya untuk dapat diakui keberadaannya diperlukan suatu adaptasi. Salah satu cara adaptasi untuk dapat bertahan di lingkungan yang lebih kompleks adalah memanfaatkan jaringan sosial yang dimiliki. Perencanaan model jaringan sosial masyarakat majemuk penting dalam upaya membangun kebersamaan dan keeratan hidup antarmasyarakat karena setiap orang punya keterbatasan alami dalam berhubungan dengan orang lain (Rabushka dan Shepsle, 1972; Blau, 1977; Lenski, 1966; Kapferer, 1969; & Bott E., 1957) sehingga hubungan sosial lebih banyak terjadi dalam sesama masyarakatnya, dibandingkan dengan orang yang mempunyai atribut yang tidak sama, di sinilah perencanaan sosial dibutuhkan.

Jaringan sosial terbentuk dalam masyarakat karena manusia pada dasarnya mempunyai keterbatasan dalam berhubungan dengan manusia lainnya (Biosisevain dan Clyde, 1972) sehingga mereka akan memilih untuk berhubungan dengan orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan, agama, suku-bangsa, daerah asal, dan lain sebagainya, atau akan berhubungan dengan orang yang mempunyai jaringan

homophilly (Rabushka & Shepsle, 1972). Cohen (1969) mengemukakan bahwa *homophilly* adalah sejauh mana pasangan-pasangan individu yang berinteraksi mempunyai kesamaan dalam beberapa atribut, seperti kepercayaan (agama), ras, suku-bangsa, bahasa, marga, daerah asal, kekerabatan, persaudaraan, dan kedudukan sosial. Kebalikannya, *heterophilly* adalah sejauhmana inidividu-individu yang berinteraksi berbeda dalam berbagai ciri sehingga orang yang mempunyai jaringan *homophilly* akan lebih besar. Perencanaan sosial ditujukan pada pengembangan jaringan *heterophily* masyarakat.

Blau (1977), mengemukakan bahwa aspek *inequality* atau ketidaksamaan (perbedaan) status anggota kelompok masyarakat secara vertikal yang mengacu pada penggolongan status sosial dalam kaitannya dengan pendidikan, kekuasaan (*power*), keterampilan, dan intelegensia, serta aspek keanekaragaman (*heterogeneity*) antarkelompok masyarakat secara horizontal yang mengacu pada penyebaran (penggolongan) status anggota kelompok masyarakat, seperti: ras (*race*), suku-bangsa, agama, keturunan, marga, bahasa, status sosial, pekerjaan, perkawinan, dan afiliasi politik sebagai *nominal parameters* akan cenderung menjadi hambatan interaksi sosial antar kelompok masyarakat yang multi-etnik. Kapferer (1969) dan Usman (1985), mengemukakan bahwa adanya proses interseksi akan meningkatkan interaksi sosial antaranggota kelompok etnik masyarakat serta proses konsolidasi akan memperkuat pertalian (ikatan) sesama kelompok etnik masyarakat atau menguatkan hubungan sosial antarkelompok masyarakat etnik yang multi-etnik.

Kebutuhan membangun keeratan sosial melalui jaringan sosial lintas etnik dikemukakan Nasikun (1992), bahwa perbedaan-perbedaan ras, suku-bangsa, agama, kedaerahan, dan pelapisan sosial saling silang-menyilang satu sama lain menghasilkan suatu keanggotaan golongan yang bersifat silang-menyilang pula. Proses *cross-cutting affiliations* yang demikian telah menyebabkan konflik-konflik antarkelompok masyarakat tidak menjadi terlalu tajam. Konflik suku-bangsa, misalnya, akan direduksi oleh bertemunya loyalitas agama, daerah, dan pelapisan sosial dari para anggota suku-bangsa yang terlibat di dalam pertentangan tersebut. *Cross-cutting affiliations* dan *cross-cutting loyalties* akan dan telah menyebabkan adanya hubungan sosial antaranggota masyarakat yang multi-etnik sehingga Mitchel (1972), mengemukakan bahwa jaringan sosial lebih menitikberatkan pada karakteristik keterkaitan dari hubungan antarindividu dengan lainnya di dalam hal perilaku manusia di dalam masyarakat.

MASALAH KONFLIK

Konflik sosial di Papua disebabkan faktor beragam. Dikotomi orang asli dan pendatang masuk dalam pusaran permasalahan sosial. Otsus memisahkan orang asli dan pendatang, isu Bangsa Pribumi se-Dunia memperkuatnya. Peringatan Bangsa Pribumi oleh pilar Dewan Adat Papua (DAP) bersama beberapa elemen masyarakat

lainnya di Wamena (2008), memicu kerusuhan, penembakan dan tewasnya Opinus Tabuni. Tanggal 27 Oktober 2008 berkaitan dengan peristiwa Wamena dan demonstrasi *International Parliament for West Papua* (IPWP), Buchtar Tabuni (ketua IPWP), Forkorus Yoiboisembut (ketua DAP), dan Leonard Imbiri (sekretaris DAP) diperiksa penyidik Direkrim Polda Papua. Tanggal 3 Desember 2008 Buchtar Tabuni ditangkap dan ditahan Polda Papua. Tanggal 9 Desember 2008 Sekjen IPWP dalam rangka hari HAM tanggal 10 Desember 2008 menyatakan penangkapan Buchtar Tabuni ibarat “bermain api”. Tetapi, penangkapan Tabuni didukung kepala-kepala suku rukun keluarga Jayawijaya di Jayapura. Aliansi Mahasiswa Anti Kekerasan (AMAK) malah meminta aparat menangkap ketua dan sekjen PDP dan ketua DAP. Tanggal 19 Januari 2008 puluhan massa AMAK, IPWP, dan Otorita Nasional Papua Barat (ONPB) dalam demonstrasinya membawa spanduk “Kami Semua Separatis, Tangkap” dan “Papua merdeka harga mati”. Pangdam XVII Cenderawasih Mayjend TNI A.Y. Nasution (26 Oktober 2008) menyatakan masih ada aspirasi berbau separatis dan meminta tokoh adat dan tokoh agama ciptakan stabilitas kamtibmas.

Konflik ideologi seakan menempatkan sekelompok orang asli berhadapan dengan orang asli lainnya, migran dan aparat keamanan. Negara menetapkan kelompok menyuarakan merdeka sebagai Kelompok Separatis Politik (KSP) dan Kelompok Separatis Bersenjata (KSB). Politik identitas mengemuka, seperti orang ras melanesia dan *nonras* melanesia, orang asli dan tidak asli, orang asli campuran dan orang asli *tulen*, orang asli dan pendatang, orang pantai dan pedalaman, orang kota dan orang kampung, orang kabupaten induk dan pemekaran, kelompok merah putih dan kelompok merdeka, kelompok otsus dan pemekaran, dan identitas sosial lainnya dengan motif, alasan, dan tujuan tertentu. Menguatnya politik identitas menyebabkan kesatuan, persatuan dan ikatan masyarakat majemuk ini menjadi terganggu, terusik dan melonggar. Pengkotak-kotakan masyarakat ini oleh sekelompok orang dipandang sebagai politik “adu domba” (*divide et impera*) atau pelemahan aspirasi merdeka.

Migran dituduh kalangan tertentu sebagai penyebab orang asli melarat, miskin, terpinggirkan, marginal dan terbelakang, serta telah mengusik daya tampung sosial. Migran dinilai menjadi penyebab permasalahan hidup orang asli, padahal penyebabnya beragam, seperti: tekanan pemerintah pusat, kuatnya pendekatan keamanan, ketidaktepatan pendekatan, strategi dan kebijakan pembangunan selama ini, persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme, persoalan sosial, politik, keamanan, dan ideologi, lemahnya birokrasi pemerintahan, kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah, taraf budaya masyarakat dan lainnya. Dominannya pendekatan politik menyebabkan semua persoalan sosial didekati dari perspektif politik, misalnya tingginya pengidap HIV/AIDS (*Odha*) telah merambat pada wacana adanya rencana pemusnahan (*genozide*) orang asli. Pertanyaannya apakah *Odha* yang banyak di Bali, Jakarta, dan Jawa Timur merupakan *genozide*?

Konflik sosial juga ditandai dengan ketidaknyamanan migran karena pengalaman kasus kerusuhan, pembunuhan, pembakaran, pemalakan, dan intimidasi sehingga kalangan migran tertentu mempersenjatai dirinya.

“... ah senjata-senjata ini untuk *kitorang* (kita) berjaga-jaga saja, jangan-jangan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, daripada mati konyol *khan*...” (AN, 2008).

Lain lagi ceritera (pengakuan) beberapa migran asal Jawa:

“... *mas*, kami tidak membangun rumah dan membeli barang-barang berharga selama di sini (Papua) karena khawatir terjadi *apa-apa* (kerusuhan). Perhatikan juga saudara kita WNI keturunan China, mana ada rumahnya yang bagus di Papua, padahal usahanya menggurita dan sukses luar biasa di Papua....” (PD, 2008).

Sepanjang pelaksanaan otsus belum juga menunjukkan tanda-tanda membaik secara signifikan, walaupun semakin banyak masyarakat dapat hidup lebih. Suasana kurang kondusif masih saja terasa karena dinamika sosial-politik. Otsus tidak diterima semua orang asli. Dewan Adat Papua (DAP) sudah mengembalikan otsus pada pemerintah pusat karena dianggap gagal mencapai tujuannya. Pengembalian otsus menciptakan suasana kurang nyaman dan merupakan bentuk penentangan sosial politik terhadap pemerintah.

Konflik sosial semakin terasa ketika upaya perlawanan terhadap kelompok Papua merdeka melibatkan migran. Demonstrasi menuntut *review* Pepera 1969 tanggal 15-17 Oktober 2008 misalnya, disikapi melalui pertemuan besar elemen “merah putih” yang menamakan diri Komponen Masyarakat Papua Peduli NKRI yang membuat pernyataan sikap politik dan diserahkan ke DPRP dan dimuat dalam satu halaman penuh koran lokal terbesar di Papua (Cenderawasih Pos, 12-13 Oktober 2008). Pertemuan dihadiri Barisan Merah Putih, *Ondoafi*, *Ondofolo*, kepala suku, organisasi keluarga besar TNI/Polri, Pejuang Trikora, Resimen mahasiswa, Pramuka, tomas, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, PKRI, *paguyuban* (migran), GM Trikora, FKPPIB dan komponen lainnya. Apabila suasana konflik ini tidak di kelola secara baik maka bisa saja muncul konflik terbuka sesama masyarakat asli maupun antara masyarakat asli dengan pendatang (migran). Ketua Komisi A DPRP (Yance Kayame, 24 Oktober 2008) mengemukakan perlunya rekonstruksi otsus dalam penyelesaian masalah Papua dan bahwa riak-riak yang terus terjadi ini jangan dianggap sepele karena bisa menjadi ancaman besar bagi integrasi bangsa.

Perjalanan otsus seolah memunculkan pertentangan antara kelompok masyarakat asli menuntut “merdeka” berhadapan dengan orang asli “merah putih”, masyarakat migran dan pihak keamanan. Tetapi karena sifat perjuangan (demonstrasi) kelompok ingin merdeka masih bersifat damai yang mengakibatkan belum terjadi konflik terbuka. Sifat perjuangan politik ini sejalan dengan semboyan ‘Papua zona damai’. Perjuangan menuju Papua merdeka masih ada walaupun sangat jauh berkurang (Bas Swebu,

2008), dan otsus diuji untuk menghilangkannya. Perilaku negara memperlihatkan keraguan terhadap kelayakan undang-undang ini. Otsus melakukan perbedaan ras dan seakan-akan memperkuat nasionalisme bangsa Papua, walaupun awalnya dirancang untuk melakukan kebijakan keberpihakan (*affirmative policy*) pada orang asli Papua. Adakah kelalaian negara atau ada sesuatu pertimbangan politik lainnya?

Rabuskhya & Shepsle (1972), mengemukakan sejarah pergerakan dan konflik sosial politik dalam masyarakat majemuk yang masih labil banyak disebabkan atau memanfaatkan karakter dari individu, kelompok (*group*), kelompok kedaerahan, kelompok suku bangsa, kelompok *opportunity*, dan struktur sosial spesifik penduduk lainnya. Konfigurasi kompetisi atau konflik selalu ditandai oleh perbedaan dan persengketaan antarelemen dalam struktur sosial masyarakat dengan latar belakang karakter spesifik individu, psikologi, tipe afiliasi, kedaerahan, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan ideologi. Demikian maka pertentangan antarelemen masyarakat ini bisa kemudian menciptakan suatu pergeseran pertentangan yang bergeser pada tahapan konflik yang tersembunyi ke tahap konflik terbuka, tahap negosiasi, dan tahap konsensus.

Konflik sosial karena pemaksaan pembentukan daerah otonomi baru di Papua yang kontraversi oleh negara (pusat) misalnya telah menyebabkan terjadinya beberapa proses sosial-politik spesifik, seperti bergeraknya solidaritas sosial antarkelompok masyarakat yang memiliki kesamaan afiliasi, meningkatnya mekanik sistem berdasarkan kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan afiliasi, proses meningkatnya identitas kedaerahan, menguatnya disintegrasi regionalisme daerah, terjadinya pergeseran loyalitas kepemimpinan, menurunnya rasa kebhinekaan masyarakat, *heterogeneity* dipandang sebagai ancaman (faktor negatif), kecenderungan menipisnya rasa persaudaraan dan solidaritas, meningkatnya sentimen kedaerahan dan *ethnicity*, persaingan kewilayahan atas dasar penguasaan sumber-sumber ekonomi potensial, melemahnya kebhinekaan awal menuju penguatan kebhinekaan atas dasar etnik dan regionalisme afiliasi, dan terpolanya identitas sosial-budaya kedaerahan atas dasar gerakan organik maupun mekanik.

Berkaitan dengan pergeseran sosial di atas maka Clifford Geertz, menyebutnya sebagai *primordial sentiment* sebagai lawan dari *civil politics*. *Primordial sentiment* atau *attachments* adalah sifat budaya dan tingkah laku politik pada suku (*tribe*), daerah (*region*), agama, kelompok etnik dan pengelompokan-pengelompokan sejenisnya yang bersifat *given*. Hal ini dalam banyak hal justru telah menjadi dasar yang kuat dari suatu kekuasaan dan identitas karena mempunyai sifat pasti dan *instant*. Dalam ikatan sosial semacam ini, kehidupan politik kenegaraan dipandang sebagai persoalan keluarga, sementara kekuasaan dan identitas pribadi atau kelompok dilihat sebagai sesuatu yang abstrak dan tidak menentukan. Keadaan demikian ini kontras sekali dengan *civil politics* yang memandang kinerja (*performance*) dan prestasi (*merit*) – bukan hubungan keluarga – lebih penting sebagai pertimbangan.

Suatu masyarakat yang sarat dengan *primordial sentiment* semacam ini memerlukan suatu *integrative revolution*, yaitu suatu gerak integrasi masyarakat ke

dalam ikatan-ikatan kultural yang lebih luas yang mendukung suatu pemerintahan daerah. Tanpa adanya gerak integrasi yang semacam ini, bila timbul sedikit saja kekecewaan yang berkaitan dengan suku, agama, ras dan antargolongan akan meningkatkan potensi meledaknya konflik. Kemampuan gerak integrasi suatu masyarakat dapat diartikan sama dengan tingkat ketahanan pemerintahan nasional dan daerah ini. Semakin tinggi gerak integrasinya semakin tinggi pula tingkat ketahanan pemerintahan daerah ini. Dalam pemahaman seperti ini maka apabila kemampuan gerak integrasi masyarakat suku, daerah, afiliasi, dan kepentingan politik yang berada dalam suatu wilayah (*mis.* Provinsi Papua Barat, atau wilayah lain Papua yang menginginkan pemekaran provinsi seperti Papua Selatan, Papua Tengah atau *Nieu Eva*) maka akan menjadi proses melemahnya integrasi masyarakat dalam skala yang lebih besar dalam era otonomi khusus.

Kasus paling mengemuka adalah pertentangan (pembangkangan) beberapa bupati asal pegunungan tengah dengan Gubernur Provinsi Papua (Bas Swebu) dalam suatu rapat kerja daerah, atau antara Bupati Merauke dengan Gubernur Provinsi Papua, sampai-sampai Bupati Merauke (Gebze) bersumpah tidak akan menginjakkan kakinya di ibukota Provinsi Papua. Kebijakan pemekaran daerah ini, pada tahap tertentu, secara langsung maupun tidak langsung telah meningkatkan *primordial sentiment*, melemahnya *civil politic*, proses pergeseran loyalitas masyarakat daerah ini, menguatnya disintegrasi teritorial masyarakat suku, dan berubahnya (melemahnya) loyalitas terakhir (*ultimate loyalty*) masyarakat. Dalam pergeseran loyalitas ini maka yang sangat perlu diperhatikan adalah adanya kekuasaan, otorita, dan dana untuk memaksakan loyalitas karena berada pada posisi yang mampu untuk menggerakkan masa dalam jumlah besar untuk suatu kepentingan politik daerah atau kelompok elit politik.

Lahirnya inisiatif, usaha, perjuangan, kegiatan, demonstrasi jalanan, atau kebijakan pemekaran pemerintahan di Papua dapat pula dipandang sebagai manifestasi dari *integration civil politics* yang terhenti, terganggu, melemah, dan belum selesai. Tetapi, pada titik tertentu tidak akan mengurangi rasa nasionalisme. Ia merupakan kehendak bersama untuk membangun masa depan bersama dari penduduk yang mendiami wilayah tertentu yang secara politik, kultural, historis, sosiologis dan psikologis merasa merupakan suatu komunitas yang mempunyai rasa solidaritas yang sama dan erat, serta mewujudkan konflik perebutan teritorial (*mis.* antara Kab. Jayapura dan pemekaran Grime Nawa, Kab. Asmat dan Yahukimo, atau Kab. Kerom dan Pegunungan Bintang). Dalam jangka panjang dapat memunculkan konflik atau bahkan kerja sama politik, ekonomi, dan kultural. Perhatikan saja betapa mesranya kini Provinsi Papua dan Papua Barat, padahal sebelumnya berkonflik. Curle (1971), mengemukakan bahwa konflik dalam suatu masyarakat bukanlah suatu keadaan yang statis. Konflik bersifat ekspresif, dinamis, dan dialektis.

Perlu dipahami bahwa berkonflik adalah suatu situasi yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang (bisa lebih) menunjukkan praktik-praktik untuk

menghilangkan pengakuan (hak) orang atau kelompok lainnya mengenai kekuasaan, daerah, wilayah, kedudukan, sistem, suatu mekanisme dan atau ideologi yang diperebutkan. Konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat Papua ditentukan oleh kadar kekuatan di antara individu dan kelompok-kelompok yang sedang berkonflik serta kesadaran dari kedua belah pihak (atau lebih) atas konflik yang sedang terjadi. Konflik di daerah ini dapat dibagi menjadi konflik bersifat laten atau tersembunyi, kemudian konflik menjadi mengemuka dan tidak tersembunyi lagi, pilihannya bisa kekerasan dan bisa antikekerasan, atau kombinasi dari keduanya.

Konflik sosial merupakan salah satu cara bagaimana suatu masyarakat berubah. Konflik dapat mengubah pemahaman kita akan sesama, memahami keberagaman, menghargai perbedaan, dan mendorong kita untuk memobilisasi sumber daya dengan cara-cara baru. Konflik membawa kita pada klarifikasi pilihan-pilihan dan kekuatan untuk mencari penyelesaiannya. Konflik selalu mempunyai potensi risiko (bahaya) dan potensi manfaat (peluang). Konflik menciptakan energi yang dapat bersifat merusak dan bersifat kreatif. Konflik memiliki sifat mengikat dan membawa sifat memisahkan, dapat menjadi produktif atau nonproduktif. Konflik yang produktif cenderung akan menghasilkan manfaat. Konflik yang paling nonproduktif cenderung mengacu pada pembentukan prasangka terhadap lawan, *image* negatif, stereotip, tuduhan, makian, komunikasi memburuk, sarat emosi, dan memburuknya *performance* seseorang atau kelompok masyarakat tertentu.

Meningkatnya aspek nonproduktif dalam konflik akan semakin mengkondisikan terjadinya konflik horizontal dan vertikal dalam masyarakat. Pada tataran ini konflik ditemukan di daerah ini, sebagaimana contoh dikemukakan sebelumnya. Konflik biasanya akan memproduksi atau menciptakan kondisi kurang menguntungkan dalam sistem kehidupan masyarakat. Konflik dipengaruhi oleh pola-pola emosi, kepribadian dan budaya. Reaksi-reaksi psikologis memegang peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi proses konflik. Konflik biasanya mengikuti gaya kepribadian dan psikologi seseorang atau kelompok masyarakat yang sedang bertikai. Nilai dan sistem sosial budaya juga ikut membentuk aturan-aturan dan ritual yang membawa kita pada konflik. Masih rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat, tingkat kedewasaan berpolitik masyarakat, mengemukanya aspek emosional dibanding intelektualisme, tingginya tingkat kepatuhan terhadap pimpinan formal dan informal, berlebihannya solidaritas sosial kelompok-kelompok masyarakat suku dan masih kuatnya pengaruh tokoh masyarakat dalam kehidupan masyarakat memberikan muatan signifikan terciptanya suatu konflik horizontal dalam masyarakat.

Konflik dapat dianalisis melalui upaya pemahaman tentang siapa, apa, di mana, kapan, dan mengapa konflik itu muncul dan berkembang. Kebanyakan konflik itu berwajah banyak sehingga usaha memahaminya harus merekonstruksi informasinya. Satu titik tolak yang sama adalah untuk memahami berbagai makna yang dikandung oleh sebuah konflik. Konflik dapat bertransformasi, bertambah cepat, perlahan menghilang, atau berubah bentuk. Pergeseran konflik dalam masyarakat juga dapat

dilakukan secara mekanik (disengajakan) dan organik (spontanitas). Dalam era praotonomi khusus konflik antar kelompok lebih menonjol di antara kelompok prokemerdekaan dengan kelompok prootonomi khusus, sedangkan periode era pasca pemekaran yang lebih mengemuka adalah pertentangan antara kelompok *pro* otonomi khusus dengan kelompok propemekaran, dan kelompok prokemerdekaan Papua dan kelompok NKRI. Menariknya proses pergeseran ini menempatkan migran di luar konflik atau intensitas konflik lebih banyak berada dalam masyarakat asli Papua.

Sumber konflik di Papua beragam, seperti struktural, kepentingan, nilai, hubungan antarmanusia, ideologi, dan data. Wujud konflik di Papua ditemukan beragam, seperti konflik berwujud tertutup/tersembunyi (*latent*), mencuat (*emerging*), dan terbuka (*manifest*). Konflik tentang bagaimana model dan formulasi sistem pemerintah di Papua dipandang sudah berada pada tahap *emerging* dan *manifest*. Proses konflik semakin mengacu pada pembentukan prasangka terhadap lawan, stereotip etnik, bersifat kedaerahan, membangun *image* negatif, memunculkan kebencian, komunikasi memburuk, sarat emosi, saling menyalahkan, saling menuduh, dan saling mengklaim diri. Isu tentang perbedaan ideologi antarindividu dan kelompok masyarakat juga mengemuka secara sistematis dan semakin terbuka sebagai upaya “menghancurkan” individu dan kelompok tertentu, misalnya pernyataan Gubernur Papua Barat (BA) tentang siapa saja yang menentang pembentukan Provinsi Papua Barat dianggap mempunyai ideologi berlawanan dengan Pancasila. Konflik juga lebih banyak terjadi pada kalangan masyarakat inti (*core society*) dalam kalangan birokrasi, politisi, dan tokoh-tokoh masyarakat, serta kemudian berimplikasi pada terpolarisasinya kelompok masyarakat sesuai hubungan afiliasi, kedaerahan, kepentingan, dan emosional.

Konstruksi konflik berdasarkan perbedaan sikap memunculkan adanya individu dan atau kelompok masyarakat yang dipandang sebagai kawan dan lawan dari mereka yang berbeda sikap atau pandangan tentang model ideal sistem pemerintahan di daerah ini. Dalam kondisi ini akan semakin tercipta disintegrasi sosial, *cultural*, kedaerahan, afiliasi, dan kepentingan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Kondisi ini telah memunculkan sumber dan energi yang bisa merusak tatanan kehidupan masyarakat yang sudah lama terbentuk, semakin mengikat polarisasi, dan memunculkan pemisahan sosial antarmasyarakat di Papua. Polarisasi dalam masyarakat menyebabkan secara internal kelompok-kelompok akan terjadi peningkatan (intensitas) komunikasi, berbagi pendapat dan pengetahuan, kerja sama, konsolidasi, kolaborasi, diskusi, pertemuan, dan munculnya tim inti (*core team*) yang bergerak secara terbuka dan tertutup dalam memperjuangkan pencapaian tujuannya. Dalam posisi ini maka kelompok yang berbeda akan dipandang sebagai lawan kelompoknya.

Konflik sosial kini diwarnai dengan adanya fenomena pembangkangan sosial dalam masyarakat secara organik maupun mekanik. Pembangkangan sosial ini ditandai, antara lain pengacuhan terhadap pimpinan formal tertentu, pengakuan yang melemah terhadap pimpinan atau tokoh masyarakat, ketidakpercayaan terhadap kinerja suatu kelompok berkuasa, ketidakpercayaan terhadap fungsi dan peran lembaga formal, berkembangnya lembaga masyarakat (*civil society*), ketidakpercayaan terhadap

kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan tugasnya, pengucilan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu, pembatasan terhadap aktivitas formal dan nonformal tokoh masyarakat, penghalangan terhadap kegiatan individu atau kelompok tertentu, penolakan terhadap kerja sama, koordinasi dan partisipasi dalam proses pembangunan daerah, meluasnya demonstrasi mahasiswa, meningkatnya demonstrasi masyarakat, meluasnya pembangkangan terhadap disiplin kerja dalam lembaga formal, meluasnya pembangkangan terhadap aturan-aturan formal dan nonformal dan lain-lainnya.

Konflik sebelum dan pascakebijakan pemekaran juga diwarnai oleh perlawanan-perlawanan politik, seperti penolakan kekuasaan, pembangkangan, penghindaran keputusan, aksi petugas pemerintah, aksi pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan tingkat internasional. Pembangkangan politik yang meluas dapat menunjukkan kualitas dan meluasnya konflik dalam masyarakat ini. Indikator terjadinya pembangkangan, antara lain menurunnya kepatuhan masyarakat terhadap pimpinan formal, penolakan pemberian dukungan politik pada pimpinan formal, penolakan terhadap sebuah sistem pemerintahan yang sedang berjalan, penolakan terhadap strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah, pernyataan dalam media massa yang menentang individu atau kelompok formal tertentu, membatasi fungsi dan tugas pemerintahan daerah provinsi, penolakan dan atau ketidaktaatan terhadap penugasan atasan, ketidapatuhan terhadap pribadi atasan, tingkat loyalitas bawahan (aparatur) yang semakin melemah, pembangkangan terselubung masyarakat terhadap pemerintah daerah, pembangkangan sipil terhadap hukum atau aturan yang dipandang tidak sah, penolakan terhadap anjuran pemerintah provinsi, pengembangan kebijakan yang bertentangan dengan aturan dan sistem yang berlaku, penolakan melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah tertentu, meningkatnya pertentangan dalam birokrasi pemerintahan, dan dukungan masyarakat sipil (*civil society*) yang melemah terhadap proses pembangunan yang sedang dilakukan.

KESIMPULAN

Masyarakat multiras, multisuka-bangsa, multikedaerahan, dan multiagama bukan hanya merupakan sumber awal dari bangunan kehidupan masyarakat Papua, akan tetapi juga merupakan tantangan masa depan masyarakat Papua yang harus dimenangkan jika kita benar-benar ingin membangun landasan integrasi nasional yang kokoh. Jumlah penduduk yang begitu sedikit, tetapi ada keinginan politik untuk membatasi migran masuk ke daerah ini menjadi suatu pertanyaan ada apa dibalik semua ini. Papua masih sangat membutuhkan penduduk yang cukup untuk pembangunan. Migran harusnya tidak ditempatkan pada posisi penyebab persoalan masyarakat dan pembangunan daerah ini. Meningkatkan interaksi sosial dan jaringan sosial lintas ras, suku-bangsa, kedaerahan, dan agama perlu dilakukan. Diperlukan perencanaan sosial pengembangan jaringan sosial dalam masyarakat majemuk ini menuju intensitas dan

kerapatan integrasi sosial. Pendekatan militeristik dalam penyelesaian konflik sosial perlu dikurangi dan digantikan dengan pendekatan sosial. Pengembangan asosiasi-asosiasi masyarakat lintas ras, agama, suku-bangsa dan kedaerahan perlu dilakukan secara terencana. Pengembangan jaringan sosial bersifat *cross-cutting affiliation* dan *cross-cutting loyalty* dapat mereduksi konflik sosial antaranggota masyarakat majemuk di Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwoso, R. Suprpto. 1994. "Keserasian Antara Pendatang dan Penduduk Asli: Suatu Alternatif Model". Makalah pada seminar nasional *Membangkitkan Budaya Kepoloporan Dalam Mobilitas*. Jakarta: Departemen Transmigrasi dan PPH.
- Bertran, Alvin L. 1980. *Sosiologi*. alih bahasa Sanapiah S. Faisal. Surabaya: Bina Ilmu.
- Barnes, J.A. 1969. "Network and Political Process". dalam Mitceel, J Clyde. *Social Networks in Urban Situations. Analsys of Personal Relatioship in Central Africa Towns*. Manchester: Manchester University Press.
- Berry, David. 1982. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: CV Rajawali.
- Biosissevain, Jeremy dan Clyde. J Mitchell. 1972. *Network Analysis Studies in Human Interaction*. Mouton, Paris: The Hague.
- Boissevain, Jeremy and J. Clyde Mitchell. 1972. *Network Analy-sis Studies in Human Interaction*. Paris: Mouton The Hague.
- Blau, Peter M. 1977. *Equality and Heterogeneity, A Primi-tive Theory Social Structure*. New York: The Free Press, A. Division of Mac Millan Publishing, Co.
- Boelaars, J., 1986. *Manusia Irian: Dahulu-Sekarang-Masa Depan*. Jakarta: Gramedia.
- Bott, E., 1957. *Family and Social Network*. London: Tavistock Publications.
- Cohen, Yehudi A. 1969. "Social Boundary Systems". *Current Antropology*. Vol. 10. No. 1. February.
- Epstein, A.L. 1961. *The Network and Urban Social Organization*. Rhodes Livingston Journal, hal. 29-31.
- Feagin, J.R dan C.B Feagin. 1984. *Racial and Ethnic Rela-tions*. Fourth Edition. Prentice Hall, Inc. New Jersey.
- Horowitz, Donald L. 1985. *Ethnic Groups in Conflict*. Berkeley: University of California Press.
- Joko, Affandi .1991. *Migration and The Urban Labour Market*. Thesis. ANU. Australia.

- Kapferer, B. 1969. "Norms and The Manipulation of Relationship in a Work Context". Dalam Mitchell, J. Clyde. *Social Network in Urban Situation. Analyses of Personal Relationship in Central Africa Towns*. Manchester: Manchester University Press.
- Koentjaraningrat dan D. Ajamiseba. 1994. "Reaksi Penduduk Asli Terhadap Pembangunan dan Perubahan", dalam Koentjaraningrat (ed.), *Irian Jaya: Membangun Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Djambatan.
- Lenski, Gerhard S. 1966. *Power and Privelege*. New York: McGraw Hill Company.
- Michel J., Clyde. 1972. "Networks, Norms and Institutions", dalam Jeremy Boissevain and J. Clyde Mitchell. *Network Analysis Studies in Human Interaction*. Paris: Mouton The Hague.
- Nasikun, J. 1992. *Sistem Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Pona, La. 2008. *Penduduk dan Politik Di Papua*, Papua: Rewamboina.
- Pona, La. 2008. *Fenomena Masyarakat Sipil Di Papua*. Malang: Surya Pena Gemilang.
- Pona, La. 2008. *Transmigrasi "in memoria" Di Papua*. Papua: Rewamboina.
- Pona, La. 2008. *Migrasi dan Mobilitas Penduduk Kampung-Kota Di Papua*. Malang: Surya Pena Gemilang.
- Rabushka, A. dan K.A Shepsle. 1972. *Politics in Plural Socie-ties: A Theory of Democratic Instability*. Charles E. Ohio: Merrill Publishing Company, A Bell & Howell Company Columbus.
- Rogers, Everet M. and Floyd F Shoemaker. 1983. *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru*, disarikan oleh Abdillah Hanafi. Indonesia: Usaha Nasional Surabaya.
- Roucek, J.S. and R.L. Warren. 1964. *Sociology: An Introduction*. New Jersey: Littlefield, Adams and Co.
- Shibutani, Tomatsu et al. 1963. *Ethnic Stratification: A Comparative Approach*. London: The Mac millan Company, Collier Macmillan Limited.
- Soekanto. 1983. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Syafroedin, Bahar dan Tangdililing. 1996. *Integrasi Nasional: Teori, Masalah & Strategi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syani, Abdul .1995. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Bandar Lampung: Pustaka Jaya.
- Usman, Pelly. 1985. *Konflik dan Persesuaian Antar-Etnis*. Jakarta: Kantor Meneg. KLH.